



**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN BASIS
AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN)**

Melati Ramadhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
melatirmadh@yahoo.com

Ayu Noorida Soerono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ayu_soerono@yahoo.com

Windu Mulyasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
windumulyasari@untirta.ac.id

Diterima 6 April 2019, diterbitkan 30 April 2019

Abstract

This study aims to determine the effect of the competence of human resources, internal control systems, utilization of information technology, and an understanding of accrual based government accounting system for quality of local government financial reports Province Banten. The approach used in this study is the quantitative approach. Data used in this study are primary data. Questionnaire submitted to the 90 employees of the OPD Province Banten who works in finance /accounting, as many as 82 questionnaires (91.1%) returned, 16 questionnaires (19.5%) can not be processed, and 66 questionnaires (80.4%) can be processed. The data collected were processed using SPSS 20 software program. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results showed that the competence of human resources, internal control systems, utilization of information technology, and an understanding of accrual based government accounting system has a positive and significant impact on the quality of local government financial reports.

Keywords: Quality of Financial Reports, Competence Human Resources, Internal Control Systems, Utilization Of Information Technology, Understanding Accrual Based Government Accounting System.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Kuesioner disampaikan kepada 90 pegawai di 15 OPD Provinsi Banten yang bekerja di bagian keuangan/akuntansi, sebanyak 82 kuesioner (91,1%) kembali, 16 kuesioner (19,5%) tidak dapat diolah, dan 66 kuesioner (80,4%) dapat diolah. Data yang

dikumpulkan diolah dengan menggunakan program software SPSS 20. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

PENDAHULUAN

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan, dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan dan permasalahan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan (<http://bandung.bpk.go.id/>, 2012). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016, berdasarkan hasil pemeriksaan atas 533 LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD. Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan (<http://www.bpk.go.id/>, 2015).

Berikut ini merupakan data hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten dari tahun anggaran 2011- 2015 disajikan dalam tabel 1

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Provinsi Banten Tahun 2011 s.d. 2015

LKPD (Tahun)	Opini
2011	WDP
2012	WDP
2013	TMP
2014	TMP
2015	WDP

Sumber : IHPS I Tahun 2016:292

Dari tabel 1 yang menyajikan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi Banten dari Tahun Anggaran 2011 sampai Tahun Anggaran 2015 terlihat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dua tahun berturut-turut mendapat opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atau *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terkait

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2013 dan 2014. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (4) dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK bisa menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah sudah berjalan transparan dan akuntabel atau tidak.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Permasalahan sumber daya manusia yang ditemukan di Pemerintah Provinsi Banten adalah masih kurangnya jumlah akuntan yang kompeten dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan Pemerintah Provinsi Banten, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang akuntansi untuk mempercepat pembenahan aset yang bermasalah. Pemerintah Provinsi Banten harus segera memperbaiki aset-aset yang bermasalah, karena masalah tersebut akan selalu menjadi ganjalan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Kondisi yang terjadi saat ini adalah kurangnya tenaga akuntan yang memadai di Pemerintah Provinsi Banten untuk mengelola aset dengan baik, sehingga banyak laporan keuangan dan aset yang menjadi temuan BPK. Saat ini Inspektorat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait sedang berdiskusi, untuk segera melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK dan BPKP Banten terkait dengan kekurangan sumber daya manusia.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) juga mendapatkan perhatian cukup besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji "kekuatan" sistem pengendalian internal (SPI) ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Seperti yang dikatakan oleh Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam LKPD Pemprov Banten Tahun 2014 terkait dengan sistem pengendalian intern, di antaranya, bantuan sosial tidak terencana Rp9,76 miliar yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan, sistem pengendalian internal atas kas umum daerah tahun 2014 tidak memadai karena ada dana "outstanding" pada Bank BJB sebesar Rp3,68 miliar yang diakui sebagai belanja tapi belum dipindah bukukan. Nilai tersebut berbeda dengan data dari kas daerah yang menyatakan dana "outstanding" sebesar Rp3,87 miliar. Kemudian, kurangnya pengawasan belanja perawatan kendaraan bermotor pada biro perlengkapan, sehingga tidak adanya bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp3,1 miliar, hibah 2014 sebesar Rp246,52 miliar tanpa melalui verifikasi permohonan serta hibah barang dan jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37,30 miliar tidak didukung Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima (<http://dprd-bantenprov.go.id/>, 2015). Dari fenomena di atas dapat dikatakan bahwa beberapa instansi baik biro, badan dan dinas di Pemerintah Provinsi Banten memiliki sistem pengendalian intern yang kurang baik. Hal ini tercermin pada beberapa permasalahan terkait minimnya pengawasan intern dan penyimpangan anggaran yang di temukan oleh BPK.

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya untuk merapikan pengelolaan persediaan barang di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten akhir-akhir ini mengalami kesulitan dalam mengelola barang persediaan. Temuan BPK atas pencatatan dan pelaporan barang persediaan di Pemprov Banten tahun-tahun terakhir ini menjadi permasalahan yang cukup serius, kondisi tersebut memerlukan penanganan segera, disamping permasalahan aset tetap, persediaan barang pada Pemprov Banten jumlahnya sangat besar. Pada neraca tahun 2016 nilainya lebih dari Rp65 miliar. Apabila pengelolaannya tidak tertib, maka persediaan barang bisa menjadi salah satu penghambat Pemprov Banten dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPKAD (Badan Pengelolaan dan Aset Daerah) Provinsi Banten sebagai pihak yang mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing OPD, memiliki isu-isu penting dan permasalahan yang menjadi dasar usulan dalam rencana kerjanya. Salah satunya yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten senilai kurang lebih Rp10,3 triliun. Selaku fungsi pengguna anggaran, (BPKAD) bertanggungjawab dengan pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp36 miliar. Sedangkan selaku pejabat penata usaha barang pada pengelola, BPKAD mengelola barang milik daerah atau aset Provinsi Banten yang untuk tahun 2016 senilai kurang lebih Rp12,6 triliun. Permasalahan aset yang menjadi temuan BPK harus segera di selesaikan, dengan bantuan teknologi yang memadai (<http://dppkd.bantenprov.go.id/>). Pemanfaatan teknologi yang baik diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembuatan laporan akuntansi akrual di pemerintah daerah masih mengalami kendala karena masih dalam transisi dari laporan berbasis kas. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Lelono, 2014:6). Hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2013 dan 2014 mendapat opini tidak menyatakan pendapat atau "*disclaimer*", pada tahun anggaran 2013 dan 2014, Pemerintah Provinsi Banten belum menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013:3). Masih buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten di tandai dengan belum diberikan nya opini WTP dari BPK RI. Opini TMP atau *disclaimer* yang diberikan oleh BPK atas LKPD pemerintah Provinsi Banten selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun anggaran 2013 dan 2014 merupakan tanda buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten. Jika BPK memberi opini TMP atau *disclaimer* terhadap laporan keuangan pemerintah maka itu sama saja artinya sistem pengelolaan keuangan instansi pemerintah bersangkutan masih kurang baik dari faktor SAP maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kriteria lainnya. Berdasarkan LHP BPK untuk LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2013 dan 2014 terungkap bahwa BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) terhadap LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2013, dengan permasalahan signifikan lainnya yakni penatausahaan persediaan senilai Rp 94,790 miliar pada lima OPD kurang memadai; aset

tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini sebesar Rp 193,223 miliar terdapat situ-situ yang dikuasai pihak lain dengan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga; dan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung di Tangerang yang tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 13,292 miliar. Sedangkan opini untuk LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sama dengan Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer, dengan permasalahan yakni belanja perawatan kendaraan bermotor pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp 3,1 miliar; penganggaran hibah tahun 2014 sebesar Rp 246,52 miliar dilakukan tanpa melalui proses verifikasi terhadap proposal pemohon. Selain itu, hibah barang/jasa kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan Banten sebesar Rp 37,30 miliar tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima; pengeluaran bantuan sosial tidak terencana kepada individu dan/atau keluarga sebesar Rp 9,76 miliar yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan. Selain itu, sistem pengendalian internal atas pengelolaan kas umum daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 tidak memadai. Terdapat outstanding pada Bank BJB sebesar Rp 3,68 miliar yang sudah diakui sebagai belanja tetapi belum dipindah bukukan dan masih ditampung dalam rekening titipan di Bank BJB. Selanjutnya, aset tetap pada neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 9.832,10 miliar di antaranya terdapat masalah signifikan yang diduga terkait tindak pidana korupsi (<http://sp.beritasatu.com/>, 2015). Berdasarkan data di atas, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini, berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?
4. Apakah pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Banten.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Decision Usefulness*

Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness*) merupakan suatu pendekatan terhadap laporan keuangan yang memiliki pandangan bahwa jika kita tidak bisa membuat laporan keuangan secara teoritis berkonsep benar, setidaknya kita bisa mencoba untuk membuat laporan keuangan yang lebih berguna (Scott, 2012:67). Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nurlaila, 2014:27).

Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rahmadani (2015:5) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat Dibandingkan
- d. Dapat Dipahami

Sumber Daya Manusia

Andini (2015:3) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentuk kompetensi yaitu, pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan, dan perilaku individu, yang mana ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh konsep diri, sifat bawaan diri (trait), dan motif. Adapun yang menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia menurut Andini (2015:3) yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.
- b. Keterampilan (*Skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
- c. Sikap (*Attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sistem Pengendalian Intern

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian;
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian Risiko;
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan Pengendalian;
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- d. Informasi dan Komunikasi;
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Teknologi Informasi

Menurut Delanno (2013:24), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial di hasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan per-alatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Menurut Halim dan Kusufi (2014:52) yang membahas tentang dasar akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, memahami sistem pencatatan saja belum cukup karena masih terdapat satu hal lagi yang penting yaitu masalah pengakuan. Pengakuan unsur laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset
2. Pengakuan Kewajiban
3. Pengakuan Pendapatan
4. Pengakuan Beban dan Belanja

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Delanno, 2013:26). Oleh karena itu, jika kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan OPD dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Prandono, 2015:3).

Ha1 :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. BPK menemukan enam permasalahan signifikan yang salah satunya adalah permasalahan tentang sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal atas pengelolaan kas umum daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2014 tidak memadai (<http://dprd-bantenprov.go.id/>, 2015). Apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga akan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas (Rahmadani, 2015:8).

Ha2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Delanno, 2013:24). Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Rahmadani, 2015:7). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

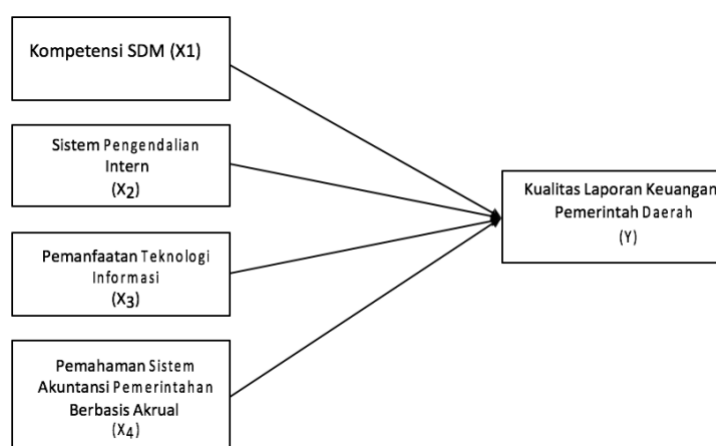
Ha3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual sistem akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar.

Pencatatan dan perhitungan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar dalam basis akrual membuat akuntansi berbasis akrual secara konseptual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Sedangkan apabila dilihat dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang saat ini diperlukan oleh pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Hamzah dan Kustiani, 2014:77). Implementasi akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan (Najati dkk, 2016:3).

Ha₄: Pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah Provinsi Banten. Jumlah OPD di Provinsi Banten sebanyak 39 OPD. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 OPD, Teknik penarikan sampel yang di gunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:67), karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan oleh peneliti. Kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing dinas pada OPD, setiap OPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 6 orang yang menjadi responden.
- 2) Responden ditetapkan pada kepala bagian keuangan/akuntansi, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan staf pelaksana yang berwenang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diserahkan langsung kepada responden. Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel X:
 - X1 : Kompetensi sumber daya manusia
 - X2 : Sistem Pengendalian Intern
 - X3 : Pemanfaatan teknologi informasi
 - X4 : Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
2. Variabel Y: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mendapatkan pengukur variable yang baik. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa syarat sebelum melakukan regresi yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, bebas normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda

Pengujian didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₂ = Sistem Pengendalian Intern

X₃ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₄ = Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual a =

Konstanta

bX = slope regresi atau koefisien regresi dari XX

e = kesalahan residual

Uji Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R² semakin kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Apabila nilai R² mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2016:99) pengujian parameter individual pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

a. Ho = b₁ = 0,

Artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Ho = b₁ ≠ 0,

Artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian parameter individual sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila t hitung $<$ t tabel. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. H_a diterima dan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Kuesioner disebar untuk 15 OPD, masing-masing OPD diberikan 6 kuesioner, sehingga jumlah keseluruhan ada 90 kuesioner. Dari 90 (100%) kuesioner yang disebar, 82 (91,1%) kuesioner diterima kembali, 8 (8,88%) kuesioner tidak kembali. Dari 82 (100%) kuesioner yang kembali, 66 (80,4%) dapat diolah dan 16 (19,5%) tidak dapat diolah karena ada informasi responden dan beberapa pernyataan yang tidak terjawab.

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan di OPD Provinsi Banten. Dari data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, jabatan, lama menjabat, dan pendidikan terakhir responden di OPD terkait.

Jenis Kelamin

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pria	38	57.6
2	Wanita	28	42.4
Total		66	100

Jabatan

Tabel 3. Jabatan Responden

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kepala Bagian/ Sub Bagian	7	10.6
2	Bendahara Penerimaan	10	15.2
3	Bendahara Pengeluaran	12	18.2
4	Staf Pelaksana	37	56.1
Total		66	100

Lama Menjabat

Tabel 4. Lama Menjabat Responden

No	Lama Menjabat	Frekuensi	Persentase (%)
1	1-5 thn	34	51.5
2	6-10 thn	22	33.3
3	>10 thn	10	15.2
Total		66	100

Pendidikan Terakhir

Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	D3	7	10.6
2	S1	38	57.6
3	S2	21	31.8
Total		66	100

Statistik Deskriptif

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

		Descriptive Statistics				
		N	Minimu	Maximu	Mean	Std.
Kompetensi Sumber Daya Manusia		66	59	90	71.70	7.407
Sistem Pengendalian Intern Pemanfaatan Teknologi Informasi		66	68	96	83.32	6.376
Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua		66	26	40	33.33	2.942
		66	37	50	45.73	3.801

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan tabel 6 maka dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 66 data. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai minimum sebesar 59 dan nilai maksimum sebesar 90. Nilai rata-rata kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 71,70, dengan nilai rata-rata sebesar 71,70, maka hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan sudah cukup merasa memiliki perilaku, keterampilan, dan sikap yang baik. Secara keseluruhan kompetensi sumber daya manusia sudah di nilai cukup baik.

Variabel sistem pengendalian intern mempunyai nilai minimum sebesar 68 dan nilai maksimum sebesar 96. Nilai rata-rata sistem pengendalian intern adalah sebesar 83,32, dengan nilai rata-rata sebesar 83,32, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap sistem pengendalian intern secara keseluruhan telah cukup diterapkan dengan baik di instansi tempat mereka bekerja.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 33,33, dengan nilai rata-rata sebesar 33,33, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara keseluruhan sudah tinggi, yang artinya pemanfaatan teknologi informasi di setiap OPD sudah baik.

Variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua mempunyai nilai minimum sebesar 37 dan nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata-rata pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua adalah sebesar 45,73, dengan nilai rata-rata sebesar 45,73, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua sudah sangat baik, pengelola keuangan sudah sangat paham tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai minimum sebesar 48 dan nilai maksimum sebesar 70. Nilai rata-rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 58,80, dengan nilai rata-rata sebesar 58,80, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan sudah tinggi, responden merasa laporan keuangan yang mereka hasilkan sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Uji Kualitas Data**Uji Validitas**

Hasil pengujian validitas setiap variabel dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil uji validitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LK 1	54.38	22.300	.683	.637	.874
LK 2	54.65	22.754	.673	.650	.876
LK 3	54.83	22.633	.364	.561	.892
LK 4	54.39	22.704	.555	.652	.879
LK 5	54.45	21.821	.681	.728	.873
LK 6	54.71	21.777	.681	.646	.873
LK 7	54.76	22.802	.488	.511	.882
LK 8	54.65	23.615	.459	.698	.883
LK 9	54.68	22.805	.376	.677	.890
LK 10	54.65	22.969	.434	.430	.885
LK 11	54.64	22.297	.708	.709	.873
LK 12	54.38	22.147	.631	.632	.876

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Hasil uji validitas variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SDM 1	67.73	50.355	.375	.	.911
SDM 2	67.53	50.407	.509	.	.906
SDM 3	67.77	49.778	.517	.	.906
SDM 4	67.53	50.407	.509	.	.906
SDM 5	67.95	48.013	.552	.	.905
SDM 6	67.53	50.407	.509	.	.906
SDM 7	67.76	48.740	.577	.	.904
SDM 8	67.53	50.407	.509	.	.906
SDM 9	67.68	48.559	.629	.	.903
SDM 10	67.74	47.548	.630	.	.903
SDM 11	67.88	46.785	.718	.	.900
SDM 12	67.85	49.823	.565	.	.905
SDM 13	67.71	48.947	.668	.	.902
SDM 14	67.67	47.549	.706	.	.900
SDM 15	67.71	48.947	.668	.	.902
SDM 16	67.85	49.823	.565	.	.905
SDM 17	67.76	51.479	.367	.	.909
SDM 18	67.67	47.549	.706	.	.900

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Sistem Pengendalian Intern (X2)

Hasil uji validitas variabel sistem pengendalian intern (X3), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern (X2)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI 1	79.38	36.054	.386	.	.830
SPI 2	78.97	36.553	.549	.	.822
SPI 3	79.42	37.417	.293	.	.834
SPI 4	79.38	37.162	.352	.	.830
SPI 5	79.35	36.969	.346	.	.831
SPI 6	79.23	36.517	.417	.	.827
SPI 7	79.11	36.958	.418	.	.827
SPI 8	79.12	37.154	.363	.	.830
SPI 9	79.17	37.926	.469	.	.826
SPI 10	79.14	37.597	.327	.	.831
SPI 11	79.17	37.403	.403	.	.828
SPI 12	78.86	37.197	.460	.	.825
SPI 13	79.08	36.286	.519	.	.822
SPI 14	79.58	34.617	.564	.	.819
SPI 15	78.85	37.915	.374	.	.829
SPI 16	79.11	37.296	.341	.	.831
SPI 17	78.97	38.276	.311	.	.831
SPI 18	79.12	37.031	.349	.	.831
SPI 19	79.15	36.992	.583	.	.822
SPI 20	78.91	36.822	.596	.	.821

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Hasil uji validitas variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TI 1	28.98	6.538	.618	.566	.758
TI 2	29.41	6.769	.444	.323	.787
TI 3	29.29	7.070	.420	.318	.789
TI 4	29.18	7.166	.553	.528	.773
TI 5	29.21	6.539	.464	.492	.786
TI 6	29.18	6.920	.449	.424	.785
TI 7	29.17	6.910	.596	.497	.765
TI 8	28.91	6.638	.596	.521	.762

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah valid.

Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X4)

Hasil uji validitas variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua (X4), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X4)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AKR 1	41.08	11.640	.641	.	.855
AKR 2	41.08	11.640	.641	.	.855
AKR 3	41.15	12.254	.518	.	.865
AKR 4	41.21	11.647	.649	.	.854
AKR 5	41.21	11.924	.570	.	.861
AKR 6	41.21	12.816	.353	.	.876
AKR 7	41.08	11.640	.641	.	.855
AKR 8	41.23	11.748	.619	.	.857
AKR 9	41.23	11.748	.619	.	.857
AKR 10	41.08	11.640	.641	.	.855

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner untuk variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X4) memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > dari r table (0,2423), yang berarti bahwa masing-masing item dari variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X4) adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 maka data dikatakan reliabel (Ghozali, 2016). Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> (α)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,887	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,909	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,835	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,798	Reliabel
Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	0,871	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* (α) untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas

Nama Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig.	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1,497	0,023	Normal
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	1,224	0,100	Normal
Sistem Pengendalian Intern (X2)	1,131	0,155	Normal
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	1,543	0,017	Normal
Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X4)	1,496	0,023	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan toleransi > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas

Nama Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,444	2,252	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,258	3,877	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,313	3,198	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua (X4)	0,893	1,119	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi variabel independen diatas 0,05 (Ghozali, 2016).

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nama Variabel	Sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,958	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0,473	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,127	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X4)	0,346	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier berganda sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-6.453	3.517		
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.088	.043	.128	2.023	.047
Sistem Pengendalian Intern	.234	.066	.294	3.544	.001
1 Pemanfaatan Teknologi	.949	.130	.550	7.301	.000
Informasi Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	.171	.060	.128	2.872	.006

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = -6,453 + 0,088 X_1 + 0,234 X_2 + 0,949 X_3 + 0,171 X_4 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
1	.944 ^a	.892	.885	1.725

Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Hasil Uji Hipotesis sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-6.453	3.517		
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.088	.043	.128	2.023	.047
Sistem Pengendalian Intern	.234	.066	.294	3.544	.001
1 Pemanfaatan Teknologi Informasi	.949	.130	.550	7.301	.000

Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	.171	.060	.128	2.872	.006
--	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS 20), 2017

Dari hasil analisis diatas, terlihat bahwa nilai koefisien dari variabel independen kompetensi sumber daya manusia (X1) bernilai positif yaitu 0,088 dengan nilai signifikan bernilai 0,047 ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan "kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" **diterima**.

Nilai koefisien variabel independen sistem pengendalian intern (X2) bernilai positif sebesar 0,234 dengan nilai signifikan 0,001 atau nilai signifikan ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan "sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" **diterima**.

Nilai koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) bernilai positif sebesar 0,949 dengan nilai signifikan 0,000 atau nilai signifikan ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan "pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" **diterima**.

Hasil yang sama juga terlihat dari nilai koefisien variabel independen pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua (X4) bernilai positif sebesar 0,171 dengan nilai signifikan 0,006 atau nilai signifikan ($< 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan "pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif (Rahmadani, 2015:6). Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil. Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik.

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan data dari jawaban responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan adalah lulusan S1, maka sudah dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki. Rata-rata responden memberikan jawaban netral untuk indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan sudah cukup merasa memiliki perilaku, keterampilan, dan sikap yang baik. Secara keseluruhan kompetensi sumber daya manusia sudah di nilai cukup baik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa, variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimaksudkan untuk tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Dengan begitu, maka penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. Indikator untuk mengukur variabel ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab setuju untuk setiap indikator penilaian, yang artinya dari kelima unsur pengendalian tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap sistem pengendalian intern secara keseluruhan telah cukup diterapkan dengan baik di instansi tempat mereka bekerja. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk teknologi komputer untuk dapat memproses dan menyimpan informasi, juga sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Meskipun banyak kemudahan yang didapat dari pemanfaatan teknologi informasi, Yosefrinaldi (2013:7) menyebutkan kelemahan dari teknologi berupa komputer diantaranya, sistem komputer tidak mudah beradaptasi jika terjadi perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi membutuhkan waktu yang lama, serta biaya pemasangan instalasi yang tinggi.

Variabel pemanfaatan teknologi dilihat dari penggunaan komputer dan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu dan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan daerah serta mengoreksi data agar terhindar dari kesalahan atau kecurangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab sering menggunakan komputer dalam melaksanakan tugasnya dan kadang-kadang memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara keseluruhan sudah tinggi, yang artinya pemanfaatan teknologi informasi di setiap OPD sudah baik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa, variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi berbasis akrual adalah hal yang baru dalam pemerintahan. Akuntansi berbasis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas (Halim dan Kusufi, 2014:48). Variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilihat dari pengakuan, pengukuran dan pencatatan. Dalam pemerintahan, penyajian laporan keuangan disajikan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Berdasarkan data jawaban responden, dalam menyusun laporan keuangan rata-rata responden menjawab selalu menerapkan akuntansi berbasis akrual. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah sangat baik,

pengelola keuangan sudah sangat paham tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa, variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
4. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, dapat melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pernyataan-pernyataan yang ada. Serta untuk meminimalisir perbedaan interpretasi dan tujuan responden saat mengisi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., dan Suhardjo, Y. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahandan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Vol 5, No 3*. STIE Semarang.
- Andini., dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi I Vol 24 No.1*. Universitas Islam Riau.
- Arifianto. S. 2013. *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat*. Jakarta: Media Bangsa.
- Artika, Yuli. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada SKPD). *Jom Fekon Vol. 3 No. 1*. Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
- Christanti, D. N. 2013. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*, Bandung.
- Delanno, G. F., dan Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hamzah, A. P., dan Kustiani, N. A. 2014. *Dasar - Dasar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Tangerang: STAN Press.
- Kiranayanti, I. A. E., dan Erawati, N. M. A. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.2*. ISSN: 2302-8556.
- Mahaputra, I. P. U. R., dan Putra, I. W. 2014. Analisis Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2*. ISSN: 2302-8556.
- Momuat, C. P. I. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal EMBA Vol.4 No.1*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. ISSN 2303-1174.
- Najati, I., Pituringsih, E., dan Animah. 2016. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua : Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi – Vol. 14 No. 1*. Universitas Jember.
- Pristiani., dan Mahmud, A. 2016. Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua Berdasarkan Demografi Pegawai. *Accounting. Analysis Journal* . Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.
- Rahmadani. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat). *Jom Fekon Vol. 2 No. 2*. Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia.
- Rahmawati. 2012. *Teori Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Scott, William R. 2012. *Financial Accounting Theory - 6th edition*. Canada: Prentice Hall.
- Subramanyam, K. R., dan Wild, J. J. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiaranti, N. M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Surastiani, D. P., dan Handayani, B. D. 2015. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 7, No. 2*. ISSN 2085-4277.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja (Edisi ke-3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se- Sumatera Barat). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah :Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
<http://banten.bpk.go.id/?p=12488>, diakses 10 November 2016
- http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2016/l/ihps_i_2016_1475566035.pdf, diakses 13 November 2016
- <http://dppkd.bantenprov.go.id/read/rencana-kerja.html>, diakses 10 November 2016
- <http://dprd-bantenprov.go.id/post/detail/bpk-tidak-menilai-laporan-keuangan-pemprov-banten.html>, diakses 10 November 2016
- <http://bandung.bpk.go.id/?p=4439>, diakses 23 November 2016
- <http://dprd-bantenprov.go.id/post/detail/peroleh-opini-wdp-kinerja-pemprov-banten-diapresiasi-dprd.html>, diakses 8 Maret 2017
- <http://www.beritasatu.com/nasional/359770-kpk-nilai-tata-kelola-pemprov-banten-masih-buruk.html>, diakses 8 Maret 2017
- <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dki2/files/RenstraBanten20152019.pdf>, diakses 8 Maret 2017
- <http://news.okezone.com/read/2014/06/16/340/999678/bpk-temukan-40-permasalahan-laporan-keuangan-banten>, diakses 14 Juli 2017
- <http://bantenraya.com/utama/12240-pemprov-disclaimer-lagi>, diakses 14 Juli 2017
- <https://newsmedia.co.id/aplikasi-pengelolaan-ketersediaan-barang-akan-digunakan-pemprov-banten/>, diakses 14 Juli 2017
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2609810/ada-dugaan-korupsi-laporan-keuangan-pemprov-banten-dapat-nilai-terburuk-bpk>, diakses 14 Juli 2017
- <http://sp.beritasatu.com/home/mengurai-akar-masalah-lkpd-pemprov-banten-dan-disclaimer-dari-bpk/91481>, diakses 14 Juli 2017.

